

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia, seperti halnya bangsa-bangsa lain dalam era globalisasi ini, tidak dapat menghindari dari arus deras nya kompleksitas perubahan (inovasi) sebagai akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi. Beberapa indikator globalisasi yang melanda bangsa Indonesia menimbulkan dampak positif dan negatif sebagai berikut; (1) Globalisasi di bidang hukum, sebagai dampak positif semakin menguatnya supremasi hukum, dan regulasi hukum, demokratisasi dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Dari sisi negative terjadinya perubahan dunia yang cepat mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global, masyarakat sering kali mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan jika tidak dipenuhi cenderung bertindak anarkis. (Budiyanto, :2004:19).(2) Globalisasi sosial bidang budaya, dapat meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan, teknologi. dan meningkatkan etos kerja yang tinggi, dari sisi negatif mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. dan memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup individualisme, pragmatisme, hedonisme, primitive, konsumerisme. (3) Globalisasi bidang ekonomi memberi peluang kepada Indonesia untuk ikut bersaing merebut pasar perdagangan luar negeri, terutama hasil pertanian, hasil

Mariati, 2012

Transformasi Nilai Demokrasi Adat Minangkabau Melalui Pembelajaran PKn Dalam Membangun Karakter Bangsa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

laut, tekstil, dan bahan tambang. di bidang jasa kita mempunyai peluang menarik wisatawan mancanegara. Akibatnya, dengan masuknya perdagangan luar negeri terjadi defisit perdagangan nasional, maraknya penyelundupan dan masuknya wisatawan ke Indonesia melunturkan nilai luhur bangsa. (Robert Gilpin, 1972: 111-119).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan dalam bidang politik telah terjadi demokratisasi, dalam bidang sosial dan budaya terjadi universalisasi dan Bidang ekonomi terjadi liberalisasi, hal inilah yang harus dipikirkan oleh seluruh bangsa Indonesia untuk mempertahankan jati dirinya.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol. Oleh karena itu agar kalangan intelektual terutama mahasiswa sebagai calon pengganti pemimpin bangsa di masa mendatang memahami makna serta kedudukan demokrasi yang sebenarnya maka harus dilakukan suatu kajian yang bersifat ilmiah.

Secara historis, demokrasi adalah konsep yang berasal dari Yunani kuno. sejak Revolusi Perancis (1789), demokrasi berkembang menjadi sebuah konsep

yang modern dan kompleks. “ Sekalipun konsep yang kompleks, logika yang diekspresikan demokrasi modern mengandung prinsip-prinsip dasar, seperti adanya unsur kedaulatan rakyat, pemerintahan mayoritas, perlindungan minoritas, kemerdekaan yang dijamin UU, partisipasi warga, persamaan hak, dan sebagainya.” (Minogue dalam Kuper & Kuper, 2000: 215).

Pada zaman Yunani-Kuno, kata demokrasi digunakan untuk menunjuk pada pemerintahan oleh orang banyak, sebagai lawan dari pemerintahan oleh sekelompok orang bentuk dan susunan negara demokrasi pada masa Yunani-Kuno sangat berbeda dengan bentuk dan susunan negara demokrasi pada masa sekarang. ada negara-negara modern dikembangkan model demokrasi tidak langsung melalui lembaga perwakilan” (Saragih, 1988: 79).

Lembaga perwakilan memegang peranan yang penting dalam menata jalannya roda pemerintahan bagi negara demokrasi modern, walaupun pada mulanya keberadaan lembaga perwakilan bukan dimaksudkan sebagai perangkat sistem demokrasi. Hal inilah yang merupakan perbedaan secara mendasar antara negara kota dengan negara bangsa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Praktek demokrasi pada negara-negara kota tidak terdapat lembaga perwakilan, sebab demokrasi menjadi pertemuan warga kota untuk membahas masalah secara bersama-sama. Dinamika demokrasi modern, selain lembaga perwakilan yang diisi melalui pemilihan umum, masih terdapat elemen demokrasi lainnya yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sinilah arti pentingnya, interest group, presure group, tokoh masyarakat, pers dan partai politik, ikut ambil bagian dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Mariati, 2012

Transformasi Nilai Demokrasi Adat Minangkabau Melalui Pembelajaran PKn Dalam Membangun Karakter Bangsa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Dalam perkembangannya, penerapan konsep pemisahan kekuasaan (separation of powers) meluas ke seluruh dunia dan menjadi paradigma tersendiri dalam pemikiran mengenai susunan organisasi negara modern. Menurut Sumantri, S (1976: 70.) “Fungsi legislatif biasanya dikaitkan dengan peran lembaga parlemen atau legislature, fungsi eksekutif dikaitkan dengan peran pemerintah dan fungsi yudikatif dikaitkan dengan lembaga peradilan “. Cara kerja dan hubungan ketiga kekuasaan negara itu disebut sebagai sistem pemerintahan negara.

Menurut Mayo (1990:218) demokrasi mencakup beberapa norma atau nilai, “yaitu penyelesaian perselisihan secara damai dan melembaga, terjadinya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah, pergantian kepemimpinan secara teratur, pembatasan pemakaian kekerasan secara minimum, pengakuan dan penghormatan atas kenegaraan serta jaminan penegak keadilan”

Demokrasi merupakan amanah terpenting dari Pancasila. Demokrasi dalam perspektif Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa merupakan jawaban atas tantangan nyata bangsa pada masa itu dengan mengelaborasi gagasan besar dunia, namun dimaknai dengan berpijak pada kearifan budaya nusantara dan sejarah bangsa secara visioner. Dalam perspektif ini, bangsa kita telah mempraktikkan demokrasi sejak sebelum kemerdekaan. Para pendiri negara yang kemudian menemukan “Pancasila sebagai dasar negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dasar di sini adalah filosofische grondslag, yaitu dasar kefilsafatan bagi berdirinya Negara Indonesia yang diserap dari *weltanschauung*, pandangan hidup bangsa yang berupa nilai-nilai fundamental, yaitu nilai-nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan /kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Mariati, 2012

Transformasi Nilai Demokrasi Adat Minangkabau Melalui Pembelajaran PKn Dalam Membangun Karakter Bangsa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Menurut Alfian mengenai kriteria ideologi yang baik (Alfian, 1978: 187).

Suatu ideologi akan mampu bertahan dan berfungsi dengan baik bila memenuhi sekurangnya tiga syarat. (1) merupakan pencerminan realita yang hidup dalam masyarakat di mana ideologi itu muncul untuk pertama kalinya, paling kurang pada saat-saat kelahirannya.(2) kemampuannya memberikan harapan kepada berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat akan kehidupan bersama dan masa depan yang lebih cerah,(3) kemampuannya mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakat.

Keunggulan lain dari Pancasila yang sering tidak kita sadari adalah rumusan teks Pancasila yang dibuat sederhana, singkat dan padat sehingga mudah dihapal oleh masyarakat hampir segala strata dan lapisan. Ini dimaksudkan agar Pancasila mudah dikenal dan diingat serta mudah menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Bersamaan dengan itu di balik teks yang singkat tersebut terkandung nilai-nilai fundamental yang memerlukan pemahaman seksama. Pancasila dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh karena Pancasila akan mengalami kerancuan bila sila-silanya diantitesiskan satu sama lain atau dipahami terpisah-sendiri-sendiri. “Setiap sila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain, sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan” (Notonagoro, 1975: 52).

Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dasar Demokrasi Pancasila Kedaulatan Rakyat (Pembukaan UUD '45) Negara yang berkedaulatan – Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Makna Demokrasi Pancasila keikutsertaan rakyat kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara ditentukan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, Demokrasi Pancasila berlaku semenjak Orde Baru. Demokrasi Pancasila dijiwai,

Mariati, 2012

Transformasi Nilai Demokrasi Adat Minangkabau Melalui Pembelajaran PKn Dalam Membangun Karakter Bangsa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

disemangati dan didasari nilai-nilai pancasila. Dalam demokrasi pancasila rakyat adalah subjek demokrasi, yaitu rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta aktif “menentukan” keinginan-keinginan dan juga sebagai pelaksana dari keinginan-itu, yang disalurkan melalui lembaga perwakilan yang dibentuk melalui Pemilu

Pada masa Orde Baru, seluruh organ struktur politik lokal diatur secara terpusat dan seragam tanpa mengindahkan heterogenitas system politik lokal yang telah ada jauh sebelum konsep kebangsaan Indonesia. “Nagari yang tadinya berdaulat bergerak dalam system demokratis dan otonom dihapus lalu diganti dengan sistem pemerintah desa, suatu konsep yang diadopsi dari Jawa” (Adnan 2003:65). Terbitnya Undang Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa menjadi salah satu tanda bahwa sistem sentralistik membuat nagari-nagari mengalami pemecahan “telah menghancurkan institusi tradisional di tingkat lokal yang sudah ada beratus tahun lamanya” (Zed M dkk 1996 :21).

Pragmatisme politik warisan Orde Baru tidak banyak membawa kemajuan bagi transformasi politik lokal, birokrasi yang belum banyak berubah juga dapat menjelaskan prakondisi distorsi politik lokal pasca orde baru, sepenuhnya merupakan warisan rezim masa lalu. “Memang intervensi politik terhadap birokrasi seperti di era orde baru sudah berkurang di era reformasi tapi kultur lama masih dianggap kental dalam penyelenggaraan pemerintah daerah” (Prasejo 2005:31).

Secara Antropologis Minangkabau termasuk suku bangsa yang serumpun dengan suku-suku bangsa lainnya di Nusantara, hal itu dilihat beberapa kesamaan dalam rumpun bahasa, budaya, ras dan agama, namun dalam hal tertentu orang

Minangkabau memiliki kekhususan dari segi aspek budaya politik yang tumbuh berkembang dalam masyarakat memiliki khazanah budaya yang sama dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan terjadinya globalisasi dan modernisasi konstruksi Ideal masyarakat Minangkabau tidak berjalan menurut realitas sesungguhnya, tidak terimplementasikan nilai –nilai demokrasi di tingkat nagari dan masyarakat.

Meskipun di lapangan sosial misalnya dalam pemilihan kepala kaum di (datuak/penghulu), masih muncul nilai-nilai kesamaan dan keterbukaan, tapi secara umum pola-pola semacam itu meredup di seluruh ranah Minangkabau. Merasuknya sistem birokrasi yang kaku dan hierarkis dan kemudian bersentuhan langsung dengan tatanan sosial Minangkabau, ditambah pula trauma sosial politik pasca-PRRI, membuat feodalisme tumbuh subur. Salah satu konsekuensinya, suara-suara kritis dari masyarakat Minangkabau mulai meredup di bawah kendali otoritarianisme negara. Secara institusional, elemen-elemen sub-ordinasi negara muncul sebagai fenomena sosial politik. Lembaga-lembaga yang muncul, formal maupun informal, umumnya tidak lebih sebagai representasi negara. “Akibatnya, corak pemimpin yang muncul pun tidak hanya feodalistis tapi juga cenderung elitis. Kalaupun ada kritisisme dari masyarakat lokal, secara umum hal itu tak mampu lagi mengubah tatanan sosial politik yang sedang mapan.” (Abdullah T 2005:17)

Di Minangkabau, eksistensi penghulu sebagai elit tradisional hingga kini juga patut digugat, mereka kerap dituding menggerogoti kaumnya dengan kecenderungan pada tindakan menjual tanah pusaka dan tanah ulayat tanpa memperhitungkan implikasi buruk bagi kehidupan anak kemenakannya sendiri.

Mariati, 2012

Transformasi Nilai Demokrasi Adat Minangkabau Melalui Pembelajaran PKn Dalam Membangun Karakter Bangsa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Peranan perempuan, yang dalam sistem matrilineal menjadi penjaga harta pusaka, dipinggirkan (Bahar, 2004: 30).

Kuatnya motif ekonomi politik di balik eksistensi dan peranan pemangku adat ikut mendistorsi nilai-nilai demokrasi di Minangkabau tanpa ada mekanisme yang bisa mengkritisi para pemimpin tradisional, dalam konteks pembangunan karakter bangsa. Ada kritik mendasar terhadap daerah Minangkabau, sejak Orde Baru sampai era reformasi, orang Minangkabau patuh pada kemauan rezim otokratis di Jakarta tidak ada lagi kritisisme Minangkabau sebagaimana ditunjukkan pada masa sebelumnya. Golkar menang besar di daerah ini jauh melampaui angka kemenangan partai itu di tingkat nasional, feodalisme baru juga muncul, tidak hanya di Istana Pagaruyung, tetapi juga di birokrasi dan kampus.

Naim (1986: 39) mengemukakan bahwa:” generasi muda Minangkabau, sejalan dengan perkembangan zaman timbul aplikasi tindakan yang tidak sesuai dengan aturan adat, masyarakat Minangkabau sudah tidak memahami sistem nilai dan keluhuran budaya mereka sendiri “. Fenomena yang terjadi semakin jelas mengisyaratkan, bahwa kebudayaan Minangkabau tampaknya tidak lagi menjadi sumber inspirasi dalam keseharian masyarakatnya. Sehingga dalam keberlangsungan proses sosialisasi dan interaksi dalam kehidupan, mereka seringkali tidak tampak tampil dalam identitas keminangannya. Seorang putra Minangkabau pada hari ini akan lebih mendambakan profesinya, ketimbang dari identitas keminangannya. Mereka lebih dikenal sebagai seorang dokter, pengacara, pejabat pemerintah, dosen dan lain – lain. Pada hal dimasa lalu, setiap

Mariati, 2012

Transformasi Nilai Demokrasi Adat Minangkabau Melalui Pembelajaran PKn Dalam Membangun Karakter Bangsa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

orang Minangkabau akan lebih dikenal dalam identitas keminangannya, misalnya H.Chaidir Latief Dt.Bandaro, pada saat sekarang rasanya jarang kita memanggilnya dengan Dt Bandaro, tapi gelar sarjana hukum yang beliau sandang tampak lebih bersinar. Bila persoalan ini dikaji lebih jauh maka dapat dilihat bahwa telah terjadi pergeseran nilai budaya Minangkabau tersebut, menurut asumsi sangat berkaitan dengan kemerosotan moral orang Minang.

Hal ini mungkin karena pengaruh praktek birokrasi pemerintahan desa masa lalu kurang demokratis, secara sosiologi antropologis nagari merupakan kesatuan bentuk bagi berbagai perangkat tatanan sosial budaya,” *Nagari* adalah lambang mikrokosmik dan sebuah makrokosmik yang lebih luas “(Naim 986: 31)

Menurut Manan I (1995: 23) “Nagari merupakan republik kecil dengan teritorial yang jelas bagi anggota- anggotanya, mempunyai pemerintah tersendiri, secara otonom dan mempunyai adat sendiri yang mengatur tata kehidupan anggotanya” . Sebagai sebuah republik kecil nagari mempunyai perangkat pemerintahan demokratis memiliki lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, mempunyai aturan sendiri yang disebut dengan adat istiadat, adanya jaminan hak azazi manusia. Manakala sistem yang berlaku menyebabkan terjadinya pergerakan pendulum kebudayaan yang menjauhi kutub budaya Minangkabau secara bertahap masyarakat Minangkabau mengalami pelapukan budaya, fungsi dan peranan sosial “*tungku tigo sajarangan dan tali tigo sapilin* “ (tungku tiga sejarangan dan tali tiga sepilin) mengalami krisis akibatnya hubungan mamak dan kemenakan mulai menjarak, ninik mamak kurang mengayomi anak kemenakan, alim ulama sangat terbatas kemampuannya mensiarkan ajaran akhlakul karimah dan ajaran

Mariati, 2012

Transformasi Nilai Demokrasi Adat Minangkabau Melalui Pembelajaran PKn Dalam Membangun Karakter Bangsa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

islam secara mendalam cerdik pandai kurang mampu menegakkan supremasi hukum, terlalu tingginya kekuasaan pemerintahan terhadap hukum lokal, tidak banyak peranan sosial dari orang empat jinih (ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang) dan generasi muda kehilangan identitas dan jati diri. Ketika persoalan yang selama ini berada dalam wilayah hukum adat, telah pula bergeser ke dalam pengaturan hukum positif maka adat terkesan mandul. Pada saat itulah segala institusi tradisional, unsur kepemimpinan tradisional dan hukum adat, sudah tidak lagi ditempatkan pada posisi yang sebenarnya.

Jika hal seperti ini dibiarkan terus berlanjut maka budaya nilai demokrasi Minangkabau yang ditanamkan sejak nenek moyang dulu dan selama ini telah di jalani, dipelihara secara utuh akan menjadi musnah serta tidak dikenal lagi oleh generasi selanjutnya, masalah inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang Nilai Demokrasi Adat Minangkabau dan ditransformasikan melalui pembelajaran PKn dalam membangun karakter bangsa, karena generasi muda harus mengenal dan mempelajari budaya yang merupakan warisan nenek moyang.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan nilai budaya Minangkabau yang selama ini kurang dikenal oleh masyarakat akan menjadi landasan dalam hidup bermasyarakat bagi generasi berikutnya terutama dalam hal bagaimana berlaku adil ketika mengambil keputusan, bagaimana bertingkah laku yang demokratis, sesuai dengan nilai moral budaya bangsa, dan bagaimana peranan serta fungsi ninik mamak dalam budaya minangkabau sesuai dengan konsep adat “ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah “.

Mariati, 2012

Transformasi Nilai Demokrasi Adat Minangkabau Melalui Pembelajaran PKn Dalam Membangun Karakter Bangsa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Dilihat dari letak geografis, Minangkabau mempunyai potensi yang cukup baik dalam bidang pendidikan terutama bila dikaitkan dengan nilai demokrasi Budaya Minangkabau. Minangkabau sejak dahulu hingga sekarang, tatanan kehidupan masyarakatnya sangat ideal karena didasari nilai-nilai, norma-norma adat dan agama Islam yang menyeluruh, dalam satu ungkapan adat berbunyi: “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Fenomena sekarang terlihat norma lama yang luhur mulai agak memudar, sementara tatanan baru belum pula terbentuk. Nilai-nilai kehidupan pada mulanya bersifat kebersamaan di masa sekarang agak cenderung bersifat individual. Nilai-nilai kehidupan selama ini tumbuh di nagari, sekarang kecenderungan masyarakat lebih suka hidup di perkotaan. Pada masa dulu norma kehidupan berpegang kepada budi dan rasa malu, sekarang cenderung mulai meninggalkan sifat tenggang rasa, dan fenomena seperti itu sering menjadikan adat Minangkabau yang mempunyai banyak sekali nilai-nilai ideal itu mulai jadi bahan cercaan.

Nilai-nilai universal dalam masyarakat Minangkabau berkaitan dengan nilai-nilai adat dan syarak dapat dikategorikan ke dalam 6 kelompok, yaitu: (1) nilai-nilai ketuhanan, (2) nilai-nilai kemanusiaan, (3) nilai-nilai persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah / kesatuan dan persatuan, (4) nilai musyawarah dan demokrasi, (5) rasa-periksa / akhlak / budi pekerti, (6) gotong royong / sosial kemasyarakatan. Keenam nilai-nilai tersebut sangat dipahami oleh para ninik mamak pemangku adat Minangkabau akan menjadi prilakunya sehari-hari, karena ninik mamak adalah *suri teladan* (contoh) bagi anak kemenakannya.

Berdasarkan permasalahan inilah peneliti mencoba mentransformasikan

Mariati, 2012

Transformasi Nilai Demokrasi Adat Minangkabau Melalui Pembelajaran PKn Dalam Membangun Karakter Bangsa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

nilai demokrasi adat Minangkabau melalui pembelajaran PKn di persekolahan. dalam membangun karakter bangsa yang benar-benar memahami dan menjunjung tinggi budaya bangsa. Penelitian ini akan menjawab pemahaman peserta didik tentang hidup berdemokrasi dan bagaimana nilai demokrasi yang ada dalam budaya masyarakat Minangkabau.

Pendidik yang sedang mendalami Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan budaya bangsa seperti yang dinyatakan dalam Amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 fasal 31 ayat 3 menyatakan bahwa: tujuan pendidikan nasional adalah "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang."

Penjabaran lebih lanjut tentang pendidikan Nasional dalam UU no. 20 /2003 fasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk menjadikan manusia sesuai dengan tujuan yang diinginkan UU no20 /2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diperlukan berbagai bentuk

Mariati, 2012

Transformasi Nilai Demokrasi Adat Minangkabau Melalui Pembelajaran PKn Dalam Membangun Karakter Bangsa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

pembinaan, seperti pembinaan disiplin melalui pendidikan nilai demokrasi yang didalamnya mencakup nilai sosial, politik, ekonomi. Sebagai suatu nilai demokrasi tidak dapat diberikan secara *built-up* diberikan langsung kepada seseorang baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Demokrasi terbentuk dalam diri seseorang melalui proses sosial yang berlangsung relatif lama dan tergantung pada sarana dan prasarana serta suasana lingkungan pendukung individu atau kelompok masyarakat bertempat tinggal, keterpaduan kondisi inilah yang membentuk nilai dan perilaku demokrasi dalam diri manusia. Sekolah sebagai wahana pendidikan nilai merupakan salah satu lingkungan vital dalam sosialisasi nilai-nilai dan perilaku demokrasi serta berkembangnya kehidupan yang demokratis.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan ruang lingkup penelitian, maka masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian : Bagaimana Nilai Demokrasi Adat Minangkabau tersebut dapat diterapkan dan diwariskan kepada generasi sekarang melalui pembelajaran PKn yang berbasiskan Demokrasi Adat Minangkabau dalam membangun karakter bangsa. Berdasarkan masalah tersebut selanjutnya dirumuskan pertanyaan penelitian:

1. Bagaimanakah demokrasi Adat Minangkabau menurut Tokoh Masyarakat dan generasi muda saat ini?

2. Faktor apakah yang menjadi kendala dalam mentransformasikan Demokrasi Adat Minangkabau
3. Bagaimana upaya para pendidik untuk mentransformasi nilai Demokrasi Adat Minangkabau melalui pembelajaran PKn kepada generasi muda dalam membangun karakter bangsa?
4. Apakah melalui Penelitian Tindakan Kelas, Pembelajaran PKn berbasis Nilai Demokrasi Adat Minangkabau dalam membangun Karakter Bangsa dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan cukup signifikan untuk meningkatkan kinerja guru yang profesional ?.

C. Tujuan Penelitian

Ditinjau dari sudut ruang lingkup, tujuan penelitian ini dapat dibedakan atas dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum penelitian yaitu mengkaji perubahan nilai demokrasi adat Minangkabau dan mengapa nilai Demokrasi Adat Minangkabau kurang dikenal oleh generasi sekarang serta upaya apa yang bisa dilakukan agar nilai Demokrasi Adat Minangkabau menjadi pedoman bagi generasi sekarang dalam bersikap dan bertingkah laku

Tujuan khusus sebagaimana rumusan masalah penelitian di atas, meliputi:

1. Pengungkapan demokrasi adat Minangkabau melalui pembelajaran PKn di Sekolah Menengah Pertama dalam membangun karakter bangsa
2. Penggalan dan analisis faktor apa yang menjadi kendala dalam mentransformasi nilai Demokrasi adat Minangkabau

Mariati, 2012

Transformasi Nilai Demokrasi Adat Minangkabau Melalui Pembelajaran PKn Dalam Membangun Karakter Bangsa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

3. Penemuan dan menganalisis peluang untuk melakukan transformasi nilai Demokrasi adat Minangkabau melalui pendidikan berdasarkan pengalaman individu siswa, berfikir, memutuskan, mengingat, dan perilaku fisik lainnya.
4. Pengungkapan dan mengimplementasikan pembelajaran demokrasi adat Minangkabau dengan pendekatan transformatif yang dikembangkan dalam pembelajaran di SMP.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis maupun teoritis. Manfaat teoritis dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menanamkan jiwa demokrasi kepada masyarakat dan generasi penerus
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemikir dan peneliti lebih lanjut, apabila dirasakan dalam penelitian ini terdapat aspek-aspek yang belum tergal dengan sempurna.

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi guru mata pelajaran PKn hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi mengenai nilai –nilai demokrasi yang ditemui dalam budaya lokal.
2. Bagi para peserta didik hasil penelitian ini dapat memperluas wawasannya tentang demokrasi dalam pembelajaran PKn
3. Bagi Kepala Sekolah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur sebagai upaya guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran PKn dan mewujudkan pengembangan kompetensi profesional guru

Mariati, 2012

Transformasi Nilai Demokrasi Adat Minangkabau Melalui Pembelajaran PKn Dalam Membangun Karakter Bangsa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

4. Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengambilan kebijakan pendidikan ,diharapkan akan menjadi salah satu masukan dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan pembinaan guru
5. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menanamkan rasa cinta para peserta didik terhadap budaya bangsa dan dapat menghargai nilai-nilai luhur bangsa kita sendiri
6. Bagi pemuka Adat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk melestarikan nilai Demokrasi adat Minangkabau
7. Bagi Peneliti sendiri hasil penelitian ini menambah pengetahuan peneliti khususnya tentang nilai yang ada dalam budaya masyarakat Minangkabau dan sehubungan dengan pembelajaran PKn peneliti bisa memperluas pengetahuan tentang Demokrasi dan membuat model pembelajaran PKn yang berbasis Demokrasi Adat Minangkabau
8. Bagi para peneliti selanjutnya , khususnya para dosen pengelola program studi PKn dan PIPS, hendaknya dapat mengembangkan lebih lanjut melalui penelitian yang lebih komprehensif, melibatkan para guru secara langsung dalam proses penelitian sejak proses awal. Para dosen hendaknya berkolaborasi dengan guru- guru PKn melalui model penelitian tindakan kelas, atau model penelitian lain yang ditujukan untuk inovasi pembelajaran PKn di sekolah

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana telah diuraikan

Mariati, 2012

Transformasi Nilai Demokrasi Adat Minangkabau Melalui Pembelajaran PKn Dalam Membangun Karakter Bangsa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

pada bagian terdahulu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode etnografi, dengan alasan dapat menggali informasi nilai Demokrasi Adat Minangkabau yang berkembang di tengah masyarakat Minangkabau (Spradley 2006: 13). Dengan kata lain, kebudayaan merupakan hasil belajar manusia termasuk di dalamnya tingkah laku, karena itu, etnografi sebagai pengetahuan yang diperoleh digunakan untuk menginterpretasikan tingkah laku sosial budaya melalui deskripsi yang holistik. (Spradley 2007: 5). Sebagai metode penelitian kualitatif, etnografi dilakukan untuk tujuan tertentu. Spradley mengungkapkan beberapa tujuan penelitian etnografi, sbb: (1) Untuk memahami rumpun manusia dalam hal ini, etnografi berperan menginformasikan teori-teori ikatan budaya; menawarkan suatu strategi yang baik sekali untuk menemukan teori *grounded*. (2) etnografi juga berperan untuk membantu memahami masyarakat yang kompleks. (3) melalui etnografi dapat diperoleh gambaran berkenaan nilai Demokrasi Adat Minangkabau secara umum ditengah masyarakat yang direpresentasikan dalam bentuk simbol, kepercayaan, keterampilan, artifak, pengetahuan lokal, dan perilaku sehari-hari (Geertz dan Le Comte 1991:58, 1984). Untuk menguji efektivitas model pembelajaran dilakukan melalui penelitian tindakan kelas (PTK) atau yang sudah dikenal dengan sebutan *classroom action research* . Pada dasarnya PTK ini bermula dari action research yang didefinisikan oleh Elliot(1991) sebagai situasi studi sosial dengan sebuah pandangan untuk meningkatkan kualitas tindakan yang dilaksanakan dalam penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai

Mariati, 2012

Transformasi Nilai Demokrasi Adat Minangkabau Melalui Pembelajaran PKn Dalam Membangun Karakter Bangsa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Propinsi Sumatera Barat, dengan alasan masih adanya kekuasaan yang berada ditangan keturunan raja dan disisi lain daerah ini sekarang maju pesat dengan dibangun pelabuhan Udara Internasional Minangkabau. Hal ini sangat mempengaruhi budaya yang selama ini kekuasaan berada ditangan keturunan Dt Rajo Sampono yang tetap menjalankan nilai- nilai demokrasi menurut adat Minangkabau secara murni.

F. Struktur Organisasi Disertasi

Langkah akhir yang ditempuh dalam penelitian ini adalah menulis laporan hasil penelitian. organisasi penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan, dibagian ini dikemukakan masalah penelitian yang dilengkapi dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian
2. Kerangka Teori, disini dikemukakan berbagai teori dan definisi yang dikemukakan para pakar yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti untuk dijadikan landasan berpikir yang dapat memberikan pemahaman universal bagi para peneliti lain yang menjadikan disertasi ini sebagai bahan kajian dalam penelitian yang dilakukannya.
3. Metode Penelitian, pada bagian ini dijelaskan pendekatan, metode dan teknik etnografis yang diterapkan dalam penelitian ini , baik dalam memperoleh data-data maupun menganalisa data sehingga didapatkan pola transformasi sitem nilai budaya yang dapat diterapkan di sekolah

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bagian ini dikemukakan seluruh data yang signifikan dan relevan dengan tujuan penelitian dan pembahasan semua temuan untuk sampai kepada pembentukan pola transformasi sistem nilai budaya yang dapat diterapkan di sekolah.
5. Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi, bagian ini merupakan bagian akhir dari penulisan laporan, yang mampu memberi gambaran yang bermakna dari hasil penelitian.

